

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan perubahan sosial, ekonomi dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.¹ Aktivitas manusia menjadi sangat terbantu dengan fasilitas atau kemudahan yang diberikan oleh perkembangan teknologi informasi. Selaras dengan itu, selain dampak positif yang diberikan perkembangan teknologi juga memiliki dampak negatif sehingga diperlukan pengaturan yang lebih lanjut.

Salah satu terobosan dalam kemajuan teknologi adalah berkembangnya jaringan internet. Arus informasi menjadi semakin cepat dengan adanya internet. Kini setiap orang diseluruh dunia dapat saling terhubung satu sama lain melalui fasilitas ini. Orang-orang dapat lebih mudah untuk saling berkomunikasi, mengirim atau memberi informasi, bahkan menyalurkan aspirasi atau kreatifitasnya masing-masing.

¹ Ermansjah Djaja, *Penyelesaian Sengketa Hukum Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik*, pustaka timur, 2010, hal. 9

Di lain pihak, dengan keberadaan jaringan internet itu sendiri memberikan ruang lingkup baru dalam bidang hukum yang perlu diatur. Pertukaran informasi yang begitu cepat, kebebasan luas yang mencakup seluruh dunia dan banyaknya orang yang mengakses di lain pihak memberikan ruang tersendiri untuk seseorang melakukan tindakan pelanggaran bahkan kejahatan. Adapun tindakan pelanggaran dan kejahatan yang dimaksud antara lain pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual khususnya hak cipta.

Perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual khususnya hak cipta merupakan suatu terobosan tersendiri dalam perkembangan hukum di era modern. Hak cipta memberikan perlindungan bagi pencipta terhadap ciptaannya sehingga haknya dapat terlindungi. Hak cipta memberikan apresiasi terhadap ciptaan sehingga dapat mendorong seseorang dapat berkarya dengan lebih baik. Pengaturan hukum terhadap hak cipta itu sendiri telah diatur oleh aturan nasional Indonesia. Pengaturan tersebut didasari oleh amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya dalam Pasal 28C ayat (1) yang menyebutkan bahwa, “setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.

Berdasarkan Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut maka setiap orang memiliki hak untuk mengembangkan diri dan meningkatkan kualitas hidupnya. Hak cipta memberikan perlindungan agar supaya pencipta dapat sepenuhnya mengambil manfaat dari hasil

ciptaannya. Pengaturan tentang hak cipta itu telah diatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pasal 9 ayat 2 “Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan, dan juga pasal yang melindungi hak cipta film terletak di pasal 40 ayat 1 huruf (E) drama, drama musical, koreografi, pewayangan, dan pantomime”.²

Berdasarkan undang-undang tersebut secara eksplisit melindungi setiap karya ciptaan sehingga setiap pencipta dapat menikmati manfaat haknya terhadap ciptaan yang dibuat. Selain itu diberikan sanksi bagi pelaku yang melakukan pelanggaran terhadap hak cipta sehingga secara tidak langsung memberikan motivasi untuk setiap orang berkarya dengan lebih baik karena adanya jaminan hukum. Undang-undang ini juga secara umum mengatur bahwa yang di maksud hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hanya saja meski Undang-Undang tersebut secara eksplisit menyebutkan klausul mengenai bagaimana suatu Hak Cipta dapat lahir dan melekat pada diri seseorang, tidak cukup jelas disebutkan di sana apakah dari ketiga jenis dasar penentuan atas timbulnya pengakuan terhadap lahirnya Hak Cipta tersebut (Hak Cipta lahir atau dianggap lahir ketika: diciptakan, diumumkan atau didaftarkan)

² Tri. (2010, Januari 25). *Pengertian Hak Cipta, Hak Paten, Hak Merek*. . Retrieved from Hak Cipta: <http://paganinita27.blogspot.co.id/2015/05/pengertian-hak-cipta-hak-paten-hak-merek.html>, tanggal akses 22 mei 2016

bersifat alternatif ataukah prioritas. Undang-Undang mengatur bahwa Hak Cipta suatu karya cipta lahir ketika karya cipta tersebut diciptakan.

Pengaturan jaringan internet lebih khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jaringan internet itu sendiri merupakan salah satu bentuk sarana perwujudan hak cipta. Pasal 25 undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.³ Undang-undang ini lebih jelas mengatur tentang hak dan kewajiban dari proses pengiriman informasi ataupun data melalui media internet. Banyak bentuk ciptaan saat ini dapat dituangkan dalam media internet sehingga baik secara langsung ataupun secara tidak langsung hak cipta memiliki korelasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kenyataannya, selain berbagai inovasi dan kemudahan yang diberikan, jaringan internet juga menjadi tempat berbagai bentuk kejahatan dan pelanggaran termasuk diantaranya pelanggaran hak cipta. Pelanggaran hak cipta dalam jaringan internet banyak terjadi bahkan dalam skala global. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan banyak bentuk ciptaan yang berwujud atau dipindah wujudkan kedalam bentuk digital kemudian disebarluaskan dalam jaringan internet. Contoh selain lagu dan film, pelanggaran hak cipta juga dapat terjadi pada buku digital, game, software, tulisan, foto, dan sebagainya..

³ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Banyaknya orang sering mendownload lagu-lagu secara gratis tanpa di kenakan biaya atau download dari website seperti google dan youtube sehingga menyebabkan kerugian ekonomi secara tidak langsung.⁴ Mengunduh lagu-lagu melalui internet dapat dikatakan melanggar hak ekonomi pemegang hak cipta yang memiliki hak eksklusif untuk mengeksploitasi hak-hak ekonomi yang terkandung dalam suatu hak cipta.⁵ Hal tersebut tentu saja secara langsung maupun tidak langsung dapat merugikan pencipta mengingat hak ekonomi yang seharusnya diterimanya sebagai pencipta menjadi terabaikan karena orang-orang dapat dengan mudahnya menikmati hasil ciptaannya bahkan tanpa biaya apapun. Hal tersebut tidak lepas dari banyaknya situs-situs dalam jaringan internet yang dengan sengaja memfasilitasi untuk mengunduh lagu ataupun film secara ilegal.

Sulitnya mengatasi pelanggaran hak cipta dalam jaringan internet diantaranya disebabkan oleh pelanggaran dapat dilakukan dalam cakupan yang luas bahkan lintas negara. Hal ini mengingat ancaman dan bahaya dari tindak pidana siber tidak hanya datang dari dalam negeri tetapi juga potensial menjadi sasaran atau objek tindak pidana siber yang dilakukan di luar wilayah Indonesia dan akibatnya terjadi di wilayah hukum Indonesia.⁶

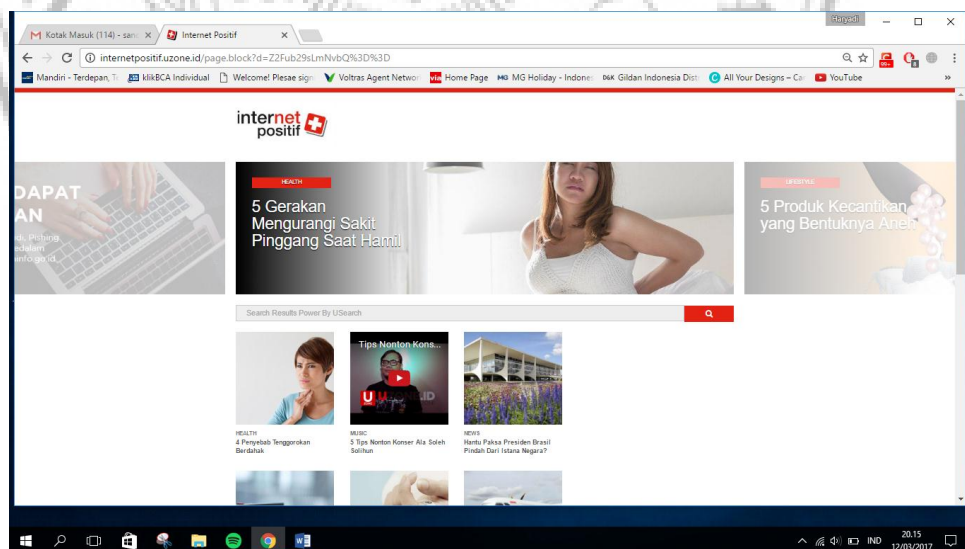
Ketika seseorang ingin membuat sebuah blog/website maka hal tersebut tidak akan terlepas dari Domain dan Hosting, untuk mengetahui secara rinci mengenai domain dan hosting. Secara umum Hosting dapat dipahami sebagai sebuah Rumah atau tempat penyimpanan, sedangkan domain adalah alamat rumah

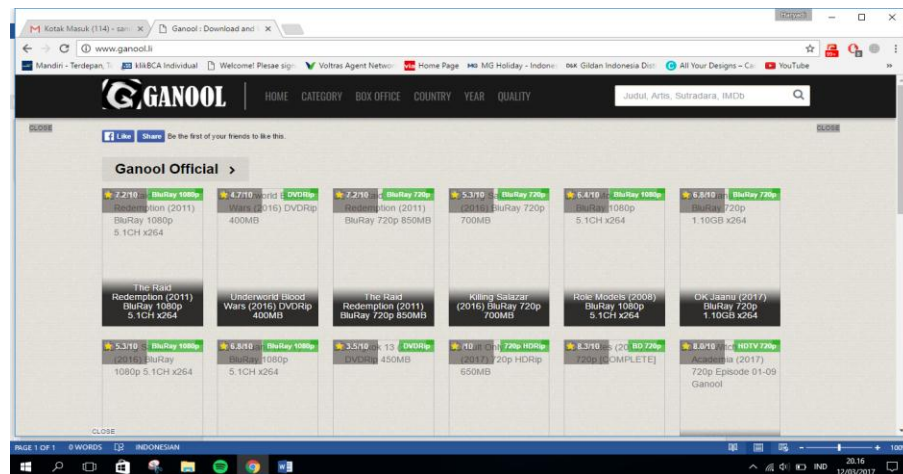
⁴ <http://ditjenhki.kemenkumham.go.id/kumpulan-berita/234-perlunya-perlindunganhak-cipta-di-dunia>

⁵ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4b202fd2a0be8/aspek-hukum-unduhlagu-di-internet>

⁶ Sigid Suseno, Yurisdiksi Tindak Pidana Siber, Refika Aditama, Bandung, 2012

atau alamat penyimpanan tersebut. Jika hosting adalah Rumah (tempat penyimpanan) dan Domain alamatnya (penyimpanan), maka Pengertian Ekstensi Domain (com, co.id, net, org, web, dll) adalah Identitas/klasifikasi Rumah tersebut apakah itu sebuah lembaga, organisasi, sekolah, pemerintahan atau yang lainnya. Mengetahui dan mengenal secara rinci mengenai ekstensi Domain tentu akan mempermudah kita untuk mengklasifikasi dan menyesuaikan tema blog/website. Seperti halnya isitilah COM yaitu singkatan dari Commercial yang artinya Komersil. Ekstensi domain ini diperuntukkan bisnis secara umum baik pada blog/website perusahaan atau pribadi. Sedangkan CO.ID singkatan dari Company Indonesia yang artinya perusahaan Indonesia. Domain ini ditujukan untuk jenis website/blog perusahaan, nama produk maupun merek yang memiliki identitas Indonesia. Untuk mendapatkan domain ini, anda harus memiliki syarat tertentu seperti KTP, Ijin Usaha, SIUP/TDP, NPWP dan Akta Notaris.





Aparat penegak hukum tidak dapat dengan leluasa menindak para pelaku yang berada di negara lain mengingat keterbatasan yurisdiksi yang dimiliki. Sarana dan prasarana yang kurang memadai menjadi penyebab lain penindakan sulit dilakukan. Selain diperlukan peralatan yang canggih, sumberdaya manusia yang memadai juga dibutuhkan untuk dapat melacak para pelaku. Karena apabila merupakan orang yang ahli, pelaku juga dapat menyamarkan identitas, menyembunyikan lokasi, dan sebagainya agar tidak mudah ditemukan.

Banyaknya pelanggaran yang terjadi dalam jaringan internet juga menjadi masalah tersendiri yang menyebabkan sulitnya permasalahan ini diatasi. Berdasarkan data yang dimiliki, pada tahun 2009 bisnis karya cipta, musik, film, software, dan karya yang lain di Internet mencapai Rp300 Triliun. Hal ini menunjukkan bahwa bisnis Internet sangat menjanjikan. Kementerian Komunikasi dan Informatika menyatakan akan memblokir situs-situs download musik atau film gratis untuk melindungi dan mengapresiasi karya cipta seni di dunia virtual.⁷

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Tifatul Sembiring

⁷ “Situs Download Gratis Diblokir”,
<http://www.seputarindonesia.com/ediscetak/content/view/416180/38/>

mengungkapkan, maraknya download konten tidak resmi untuk musik digital di Internet menimbulkan kerugian yang cukup besar.⁸ Akibat konten ini, negara dirugikan sekitar 12 Triliun per tahun.⁹ Data lainnya menyebutkan dari seluruh wilayah Indonesia, Provinsi Jawa Timur adalah daerah yang menjadi pusat pembajakan tertinggi Hak Cipta di Indonesia.¹⁰

Hal tersebut mengakibatkan kurangnya pengetahuan dan kesadaran mengenai bagaimana menghargai ciptaan orang lain. Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang HKI ini juga ditambah dengan masih sangat terbatasnya bahan-bahan bacaan mengenai bidang hukum.¹¹ Banyak masyarakat yang masih menganggap pengambilan konten-konten digital yang termasuk dalam ciptaan seperti lagu ataupun film adalah hal yang biasa dan wajar. Data yang ada kemudian saling dibagikan dan tersebar dengan cepat, yang bahkan tanpa disadari sedikit banyak merampas hak pencipta itu sendiri. Hal tersebut dapat dilakukan mengingat sangat mudahnya konten digital di duplikasi hanya sekedar mengunduh ataupun menyalin, hasilnya pun serupa dengan data aslinya. Bahkan terdapat pula oknum-oknum yang dengan sengaja menjual konten-konten tersebut untuk memperoleh keuntungan.

Kendati sudah terdapat aturan hukum yang tegas mengatur seperti undang-undang mengenai hak cipta atau informasi dan transaksi elektronik, nyatanya penegakan hukum dalam bidang hak cipta lebih khusus yang meliputi jaringan

⁸ Ibid.

⁹ Ibid.

¹⁰ Gatot S. Dewa Broto (Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Kominfo), “Siaran Pers No. 51/PIH/KOMINFO/7/2011 tentang Sosialisasi Perlindungan dan Apresiasi Karya Cipta Seni Musik Di Dunia Maya”, <http://kominfo.go.id>

¹¹ Prayudi Setiadharma, *Mari Mengenal HKI*, Good Faith, Jakarta, 2010, hal. ix

internet masih dinilai kurang. Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah ataupun aparat penegak hukum kebanyakan masih bersifat preventif bukan represif. Upaya preventif yang dilakukan antara lain hanya berupa penutupan situs, pemblokiran, memberikan edukasi kepada masyarakat, dan sebagainya. Walaupun kerap kali dilakukan tindakan represif terhadap bentuk pelanggaran hak sipta serta beberapa kali mampu menangkap para pembajak, namun sebagian besar dari mereka tidak mendapatkan hukuman yang setimpal, bahkan ada yang terbebas sama sekali dari jeratan hukum. Kondisi krisis multi dimensi yang terjadi dan hampir menyentuh seluruh aspek kehidupan, seolah sia-sia jika berharap adanya keadilan, atau menuntut suatu sistem kehidupan yang tertata baik dan profesional.

Berdasarkan fenomena di atas penulis ingin membahas tentang perlindungan Hukum Hak Cipta dalam jaringan internet (Kajian terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta)

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka penulis akan meneliti dan membahas masalah yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses penutupan konten dan hak atau akses pengguna pelanggaran hak cipta dan hak terkait sistim elektronik ?
2. Bagaimana efektivitas peraturan perundang-undangan dalam menangani tindak pidana pelanggaran hak cipta dalam jaringan internet ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses penutupan konten dan hak atau akses pengguna pelanggaran hak cipta dan hak terkait sistim elektronik.
2. Untuk mengetahui efektivitas peraturan perundang-undangan dalam menangani tindak pidana pelanggaran hak cipta dalam jaringan internet.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas tentang pelanggaran hak cipta dalam jaringan internet.

2. Manfaat Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya terkait dengan proses penutupan konten dan hak atau akses pengguna pelanggaran hak cipta dan hak terkait sistim elektronik serta dapat menjadi solusi yang dapat membantu bagi setiap individu yang membacanya.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu hukum terkait proses penutupan konten dan akses pengguna pelanggaran hak cipta. sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan penerapan Undang-Undang hak cipta.

1.5 Kegunaan Penelitian

1. Bagi Pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengambilan kebijakan yang akan diambil oleh negara dalam membuat peraturan/ menanggapi peraturan pelanggaran hak cipta.

2. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat terkait situs atau sistem yang di larang untuk di akses di internet
3. Bagi Akademisi Hukum, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan hukum dalam bidang HAKI dalam jaringan internet.
4. Bagi Penulis, Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi penulis tentang proses penutupan konten dan hak atau akses pengguna pelanggaran hak cipta dan hak terkait sistim elektronik sebagai sumber bahan refrensi untuk penelitian selanjutnya yang mempunyai kesamaan tema maupun isi dari penelitian ini.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Metode Pendekatan

Penelitian terhadap penulisan ini dilakukan dengan mempergunakan metode yuridis normatif melalui metode library research. Pendekatan yuridis normatif dipergunakan dalam usaha menganalisis bahan hukum dengan mengacu kepada norma-norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, serta asas-asas hukum, sejarah hukum, doktrin serta yurisprudensi. Metode yuridis normatif itu sendiri menggunakan pendekatan-pendekatan antara lain pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan historis (historical approach).¹²

¹² Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Surabaya, 2005, hal 93

1.6.2 Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) jenis data yaitu:

- a. Data Primer, yakni bahan hukum mengenai peraturan perundang-undangan Indonesia yang mengatur tentang objek yang diteliti. Yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang undangan yang berlaku, antara lain: Undang-Undang Dasar 1945; Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). dan Peraturan perundang-undangan yang lain, khususnya yang terkait dengan proses penutupan konten dan hak atau akses pengguna pelanggaran hak cipta dan hak terkait sistim elektronik.
- b. Data sekunder adalah data yang diungkap secara tidak langsung dari sumbernya, yang dapat diperoleh dari penelitian perpustakaan. Penelitian perpustakaan adalah penelitian yang diperoleh dengan cara mempelajari bahan-bahan hukum. Bahan hukum sekunder yang digunakan untuk mendukung bahan hukum primer, berasal dari hasil karya para sarjana, jurnal, data yang diperoleh dari instansi, serta buku-buku kepustakaan yang dapat dijadikan referensi yang dapat menunjang penelitian ini. Dalam hal ini penyusun mengambil beberapa pendapat atau teori dari para ahli hukum pidana yang menyangkut hak cipta atau pun yang berkorelasi dengan jaringan internet.

1.6.3 Bahan Hukum

Bahan hukum diperlukan dalam penelitian ini untuk mengkaji aturan-aturan hukum positif Indonesia yang berhubungan dengan Hak Cipta dan Jaringan Internet. Jenis atau tipe dalam penelitian bersifat deskriptif.¹³ Dalam tulisan ini penulis akan mencoba memberikan penjelasan mengenai permasalahan mengenai Hak Cipta dalam jaringan internet, baik pengaturan hukumnya ataupun implementasinya dalam jaringan internet.

- a. Bahan hukum primer, yakni bahan hukum mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang objek yang diteliti.
- b. Bahan tersier yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, indeks komulatif, terminologi hukum. Untuk mengumpulkan data dimaksud di atas digunakan teknik sebagai berikut menggunakan studi kepustakaan. Data yang telah terkumpul kemudian diolah dan akan dibahas dengan menggunakan metode analisis normatif kualitatif, yaitu analisis normatif karena bertitik tolak dari norma hukum positif.¹⁴

1.6.4 Analisa Bahan Hukum

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari studi kepustakaan,

¹³ Bambang Sungono, 1997, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Halaman 35. "Penelitian deskriptif pada umumnya bertujuan untuk mendiskripsikan secara sistematis, factual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik atau factor-faktor tertentu"

¹⁴ Ibid, Hal. 98.

kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan..

1.7 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang garis besar permasalahan dari keseluruhan penulisan hukum ini yang memuat pendahuluan yaitu terdiri dari latar belakang masalah, permasalahan yang mendasari pemilihan judul penelitian, tujuan dan manfaat yang ingin dicapai, kegunaan, metode penulisan hukum, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab yang didalamnya akan dibahas dan disajikan kajian teoritis sebagai sumber dalam menganalisis permasalahan yang diangkat oleh penulis yaitu tentang proses penutupan konten dan hak atau akses pengguna pelanggaran hak cipta dan hak terkait sistim elektronik.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan memaparkan data yang telah dikumpulkan sebagai hasil dari penelitian untuk menjadi sumber utama dalam pembahasan skripsi ini yang akan membahas dan menganalisa tentang proses penutupan konten dan hak atau akses pengguna pelanggaran hak cipta dan hak terkait sistim elektronik.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bagian terakhir dari hasil penelitian yang memuat kesimpulan dan saran atas setiap permasalahan yang telah dikemukakan.